

IMPLEMENTASI GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

Gafrida Widyarini

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, gafrida.23324@mhs.unesa.ac.id

Meirinawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, meirinawati@unesa.ac.id

Abstrak

Kebakaran adalah bencana tiba-tiba yang menyebabkan kerugian harta, luka, dan trauma psikologis. Oleh karena itu, pencegahan menjadi prioritas. Tim Penggerak PKK Kota Surabaya melaksanakan Program Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Siaga Kebakaran Lingkungan sebagai bagian dari kesiapsiagaan keluarga, yang merupakan Program Unggulan Bidang Kesehatan PKK Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi GKSTTB di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi GKSTTB sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antar pelaku, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap positif pelaksana kebijakan, serta dukungan struktur birokrasi yang kondusif. Sinergi keempat variabel ini menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan kebijakan publik di tingkat kelurahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pengembangan implementasi kebijakan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: GKSTTB Wonorejo Surabaya; Tanggap dan Tangguh Bencana; Siaga Kebakaran; Tim Penggerak PKK; PKK Kota Surabaya; Program Unggulan PKK.

Abstract

Fire is a sudden disaster that causes property loss, injuries, and psychological trauma. Therefore, prevention becomes a priority. The PKK Mobilization Team of Surabaya City implemented the Family Movement for Healthy, Responsive, and Resilient Disaster Preparedness (GKSTTB) Environmental Fire Preparedness Program as part of family preparedness, which is a flagship program of the Central PKK in the health sector. This research aims to analyze the implementation of GKSTTB in Wonorejo Subdistrict, Rungkut District, Surabaya City. The method used is descriptive with a qualitative approach, collecting data through interviews, observations, and documentation. The analysis refers to George C. Edward III's policy implementation theory, which emphasizes four key variables of implementation success: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the success of GKSTTB implementation is strongly influenced by the effectiveness of communication among actors, the availability of adequate resources, the positive attitudes of policy implementers, and the support of a conducive bureaucratic structure. The synergy of these four variables is the key to achieving public policy objectives at the subdistrict level. This research is expected to serve as an evaluation and provide recommendations for the development of similar policy implementations in the future.

Keywords: Evaluation, Family Hope Program, Government.

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan ilmu yang berfokus pada pengelolaan negara dan kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat, termasuk pelayanan publik di bidang kesehatan dan keselamatan (Sugiyono, 2017). Pelayanan ini menekankan pendekatan partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan, dengan tujuan

memberdayakan masyarakat, khususnya keluarga, agar mampu menjaga kesehatan serta kesiapsiagaan terhadap bencana (Anazkia, 2025).

Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, memiliki peran vital dalam membentuk karakter individu serta menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana, seperti kebakaran rumah tangga (Antara Jatim, 2022). Kebakaran sering terjadi akibat kelalaian, dan penanganannya

membutuhkan kesigapan serta pengetahuan dasar dari anggota keluarga (Arai & Oktoriana, 2017). Oleh karena itu, edukasi mengenai risiko dan penanganan kebakaran menjadi penting sebagai bagian dari upaya preventif dan promotif dalam pelayanan publik (Suhartono, 2022).

Kebakaran merupakan bencana yang sering kali terjadi akibat kombinasi kelalaian manusia, kondisi teknis yang buruk, dan faktor alam. Kelalaian seperti instalasi listrik tidak standar, lupa mematikan kompor, atau membuang puntung rokok sembarangan, menjadi penyebab umum. Sementara itu, faktor teknis seperti korsleting, kebocoran gas, dan kerusakan sistem deteksi juga turut berkontribusi. Selain itu, faktor alam seperti sambaran petir atau letusan gunung berapi turut meningkatkan risiko kebakaran, terutama di tengah perubahan iklim global (Emilda et al., 2022).

Menyadari bahaya kebakaran, berbagai inisiatif pencegahan dan kesiapsiagaan dilakukan. Salah satu contohnya adalah Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) yang digagas oleh Tim Penggerak PKK Pusat dan dilaksanakan di Kota Surabaya sejak 2021. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas keluarga dalam menghadapi bencana, khususnya kebakaran. Implementasi dilakukan melalui sosialisasi, evaluasi, dan penunjukan daerah percontohan di tingkat kelurahan. Tiga kelurahan di Surabaya ditetapkan sebagai pilot project, masing-masing fokus pada PHBS, kesiapsiagaan kebakaran, dan kepedulian lingkungan (Husnawati & Yusran, 2024).

Sebagai bagian dari pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB), TP. PKK Kota Surabaya mengirimkan daftar usulan kelurahan pilot project kepada TP. PKK Provinsi Jawa Timur melalui surat resmi pada 12 Oktober 2021. Tiga kelurahan yang terpilih melengkapi evaluasi administrasi, termasuk pelaporan kegiatan dan data pendukung sesuai Buku Petunjuk Teknis GKSTTB 2021 – 2024 (Kusumawardani & Oktariyanda, 2024).

Setelah melalui proses verifikasi lapangan oleh TP. PKK Provinsi Jawa Timur, TP. PKK Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, ditetapkan sebagai perwakilan kategori Siaga Kebakaran Lingkungan. Kelurahan ini, bersama 26 TP. PKK Kelurahan lainnya dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, terpilih untuk melanjutkan penilaian ke tingkat nasional. Keberhasilan TP. PKK Kelurahan Wonorejo menjadi bukti nyata kontribusi masyarakat dalam kesiapsiagaan kebakaran dan mendapat apresiasi di tingkat nasional (Pratiwi, 2019).

Berdasarkan Surat Ketua TP. PKK Pusat nomor:360/PokjaIV/PKK.Pst/XI/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Penjadwalan Observasi Lapangan Daerah Pilot Project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana pada Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa telah terlaksananya tahapan konfirmasi *evidence*, validasi *evidence*, dan wawancara pada daerah usulan Pilot Project GKSTTB Provinsi Jawa Timur, maka dilanjutkan dengan tahapan observasi lapangan oleh TP. PKK Pusat pada tanggal 6-9 Desember 2023 yang merupakan bagian dari aspek penilaian, terpilih 5 (lima)

kelurahan dari 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tabel dibawah ini (Prayogo & Fanida, 2024).

Tabel 1. Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Daerah Pilot Project GKSTTB

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Pilot Project
Jawa Timur	Kota Surabaya	Rungkut	Wonorejo	Siaga Kebakaran Lingkungan
	Blitar	Sutojayan	Kedung Bunder	Menuju PHBS
	Kab Kediri	Wates	Wonorejo	Peduli KIA
	Ngawi	Karangjati	Gempol	Peduli Stunting
	Banyuwangi	Cluring	Plampangrejo	Peduli Stunting

Sumber : TP. PKK Kota Surabaya, 2023

Administrasi publik merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pengelolaan negara dan organisasi pemerintahan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik demi tercapainya tujuan bersama. Dalam konteks pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan keselamatan, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan menjadi landasan utama. Pelayanan ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memainkan peran penting dalam mendukung upaya tersebut (Pemerintahan Surabaya, n.d.).

Keluarga memiliki fungsi vital dalam membentuk nilai, karakter, serta tanggung jawab sosial setiap anggotanya. Dalam menghadapi bencana, keluarga juga menjadi garda terdepan. Salah satu jenis bencana yang kerap mengancam kehidupan rumah tangga adalah kebakaran, yang seringkali disebabkan oleh kelalaian manusia maupun faktor teknis dan alam. Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran rumah tangga menjadi hal penting yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, serta peran aktif seluruh anggota keluarga (Sasmito & Ns, 2023).

Sebagai bentuk upaya konkret dalam meningkatkan kesiapsiagaan keluarga terhadap bencana, Tim Penggerak PKK meluncurkan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB). Di Kota Surabaya, tiga kelurahan ditetapkan sebagai pilot project, salah satunya adalah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut yang difokuskan pada kesiapsiagaan terhadap kebakaran lingkungan. Program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Umum TP. PKK Pusat dan buku petunjuk teknis pelaksanaan GKSTTB 2021–2024, dengan dukungan koordinasi antara TP. PKK pusat, provinsi, dan kota (Subarsono, 2011).

Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi beberapa kendala di lapangan. Pertama, sosialisasi, pelatihan, dan informasi belum merata di seluruh wilayah, terutama di kawasan perumahan elite. Kedua, keterbatasan sumber daya seperti kurangnya perlengkapan P3K dan alat pemadam kebakaran rumah

tangga serta belum maksimalnya keterlibatan seluruh anggota keluarga. Ketiga, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengubah perilaku terkait mitigasi bencana. Keempat, koordinasi antarinstansi yang belum berjalan optimal (Sugiyono, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti implementasi program tersebut melalui kajian berjudul "Implementasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya." Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 serta indikator implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini dipilih karena dianggap relevan dengan fokus penelitian dan dapat memberikan landasan analisis yang kuat terhadap pelaksanaan program GKSTTB di lapangan (TP. PKK Kota Surabaya, 2023).

Implementasi merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik yang melibatkan berbagai tindakan nyata untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Para ahli memberikan beragam definisi mengenai implementasi. Implementasi sebagai pelaksanaan tindakan untuk mencapai sasaran dari suatu keputusan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, 2007). Menekankan pentingnya memahami aktivitas setelah kebijakan diberlakukan, termasuk dampak kepada masyarakat (Wahab, 2004). Implementasi sebagai rangkaian tindakan oleh individu atau kelompok untuk merealisasikan tujuan kebijakan (Wantouw et al., 2023). Sementara itu pada penyampaian kebijakan kepada masyarakat, termasuk penyiapan peraturan, sumber daya, dan mekanisme penyebaran (BNPB, 2020). Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi bagian dari sistem terencana untuk mencapai tujuan tertentu (Damkar Banda Aceh, 2020).

Dari berbagai pandangan tersebut, implementasi kebijakan dapat disimpulkan sebagai suatu proses terstruktur yang melibatkan aktor, tindakan, dan sumber daya guna mencapai hasil sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan

METODE

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, khususnya aspek Siaga Kebakaran Lingkungan oleh Tim Penggerak PKK di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Penelitian kualitatif ini bertujuan memahami fenomena sosial dalam konteks alami dengan mengandalkan pada pengamatan dan interaksi langsung dengan subjek yang diteliti (Kominfo Jatimprov, 2023).

Populasi dan Sampel (Sasaran Penelitian)

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana di Kelurahan Wonorejo. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu dengan

mempertimbangkan relevansi dan peran informan dalam program. Informan utama meliputi Lurah Kelurahan Wonorejo, Ketua TP PKK Kelurahan, Kader PKK yang terlibat langsung dalam kegiatan, perwakilan dari Kader MADAGASKAR (Masyarakat Sadar Bencana Kebakaran), serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat program. Pemilihan informan didasarkan pada tingkat keterlibatan dan pemahaman terhadap pelaksanaan program (PKK Jakarta, n.d.).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik, yaitu (Buku Petunjuk Teknis Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana 2021–2024, 2021):

1. Wawancara mendalam: Dilakukan terhadap informan kunci untuk memperoleh informasi yang kaya dan kontekstual mengenai proses pelaksanaan kebijakan.
2. Observasi partisipatif: Peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan lapangan untuk mengamati proses pelaksanaan dan interaksi para pelaksana.
3. Studi dokumentasi: Mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti peraturan, panduan pelaksanaan, laporan kegiatan, dan arsip internal PKK.
4. Studi pustaka: Menelusuri referensi ilmiah dan teori pendukung yang relevan dengan topik penelitian.

Pengembangan Instrumen

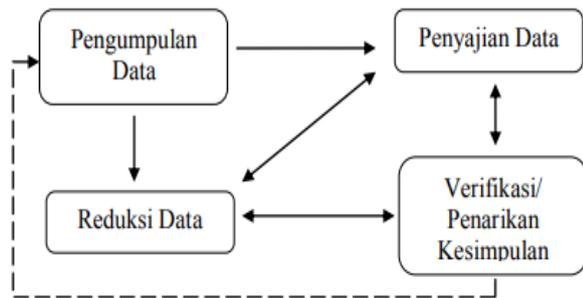
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Instrumen ini dikembangkan untuk menggali informasi dari berbagai perspektif, termasuk pelaksana program dan masyarakat penerima manfaat. Validasi instrumen dilakukan melalui expert judgment dari dosen pembimbing dan uji coba terbatas pada responden di luar lokasi penelitian (Winarno, 2008).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap (Yurita, 2021):

1. Pengumpulan data: Data dikumpulkan melalui teknik yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Reduksi data: Data diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan untuk menyoroti informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data: Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk naratif, matriks, atau tabel tematik untuk mempermudah pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Kesimpulan ditarik berdasarkan pola temuan, dan diverifikasi secara terus-menerus selama proses analisis berlangsung.

Berikut adalah bagan Model analisis data sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, seperti yang tampak pada bagan dibawah ini :



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Sumber: Miles, Huberman, & Saldana, 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Keberhasilan implementasi program Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya merupakan hasil dari kerja sama yang sinergis antara masyarakat, aparat kelurahan, dan dukungan pemerintah kota. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran. Untuk memahami mengapa program ini dapat berjalan efektif di lapangan, kita dapat menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Teori ini menekankan empat faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Dari aspek sumber daya, Kelurahan Wonorejo menunjukkan kesiapan yang sangat baik, khususnya dalam hal penyediaan peralatan pendukung mitigasi bencana. Ketersediaan alat-alat seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di seluruh balai RW dan rumah ibadah, serta kotak P3K di lebih dari 4.000 rumah warga merupakan langkah nyata yang memperkuat ketangguhan masyarakat secara fisik dan teknis. Tidak hanya itu, sarana komunikasi darurat seperti kentongan dan sirine juga telah tersedia, memberikan jalur respons cepat dalam situasi kebakaran. Pemerintah Kota Surabaya juga turut ambil bagian dengan menyediakan infrastruktur pendukung seperti hydrant dan sumur PMK (Pemadam Kebakaran) yang berfungsi sebagai sumber air alternatif. Lebih lanjut, pelatihan dari petugas damkar kepada warga memberikan pengetahuan praktis yang sangat berguna. Hal ini diperkuat oleh testimoni warga seperti Bunda Heppy dan Purnadi yang menyampaikan apresiasi atas pelatihan dan bantuan yang mereka terima. Dukungan semacam ini menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai pelaku aktif dalam upaya mitigasi bencana.

Selanjutnya, disposisi pelaksana menjadi aspek penting lainnya dalam kerangka implementasi kebijakan Edward III. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan semangat para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Di Kelurahan Wonorejo, hal ini tercermin melalui dedikasi para kader PKK dan aparat kelurahan yang terus berupaya membangun kesadaran masyarakat

meskipun awalnya dihadapkan pada berbagai tantangan. Para kader menunjukkan motivasi yang tinggi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran. Mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi dari rumah ke rumah, memberi pelatihan penggunaan APAR, serta membantu mendampingi warga dalam memahami langkah-langkah tanggap darurat. Kisah kader seperti Setyo Hartutik yang dikenal sabar, persuasif, dan gigih dalam mengajak masyarakat menjadi bukti nyata bahwa semangat dan karakter pelaksana sangat menentukan keberhasilan program. Disposisi positif ini diperkuat dengan dukungan struktural, seperti insentif non-finansial berupa pelatihan, penghargaan, dan pembinaan berkelanjutan yang memberikan rasa dihargai bagi para pelaksana.

Struktur birokrasi di Kelurahan Wonorejo juga turut memainkan peran strategis dalam menjamin efektivitas pelaksanaan GKSTTB. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan sistem kerja yang tertata, program ini dapat dijalankan secara sistematis dan berkesinambungan. Salah satu instrumen penting dalam struktur birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disusun secara detail. SOP tersebut memberikan pedoman teknis bagi para pelaksana mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi kebakaran maupun dalam kegiatan preventif. Misalnya, SOP mengatur bagaimana cara menyosialisasikan penggunaan APAR, kapan dan bagaimana harus dilakukan simulasi evakuasi, serta mekanisme pelaporan ketika terjadi kebakaran. SOP yang terstruktur dan mudah dipahami ini memungkinkan semua pihak yang terlibat, baik kader, RT/RW, maupun aparat kelurahan untuk bekerja secara serempak dan saling mendukung. Tidak hanya itu, struktur birokrasi yang adaptif juga memfasilitasi koordinasi lintas sektor, baik secara vertikal (dengan pemerintah kota) maupun horizontal (antar RW dan organisasi masyarakat), sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam penggalan sebelumnya, komunikasi menjadi fondasi penting dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik memungkinkan transfer informasi yang akurat dan jelas dari pembuat kebijakan ke pelaksana, dan dari pelaksana ke masyarakat. Di Wonorejo, kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan warga, media sosial, leaflet, dan bahkan dari mulut ke mulut. Komunikasi yang efektif ini mencegah terjadinya kesalahpahaman dan mempercepat penyebaran informasi penting, terutama saat terjadi kondisi darurat. Selain itu, adanya forum komunikasi rutin antar-kader dan aparat kelurahan memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah-langkah kerja dalam setiap kegiatan mitigasi.

Keberhasilan pelaksanaan GKSTTB di Wonorejo dapat dipahami sebagai hasil dari kerja kolektif berbasis partisipasi masyarakat yang dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Teori Edward III membantu mengurai elemen-elemen kunci dari keberhasilan ini dengan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bukan hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan, siapa

yang menjalankannya, sumber daya apa yang tersedia, dan bagaimana struktur kerja dikelola. Sinergi antara pelaksana, masyarakat, dan pemerintah menciptakan ekosistem tangguh yang mampu merespons dan mengantisipasi bencana secara efektif.

Lebih jauh lagi, kesuksesan Wonorejo dalam implementasi GKSTTB tidak hanya berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan lokal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi wilayah lain. Praktik baik ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang terstruktur, berbasis masyarakat, dan didukung oleh pelatihan serta sumber daya yang memadai, sebuah kelurahan mampu membangun budaya tanggap bencana yang kuat. Ini menjadi pembelajaran penting bahwa pembangunan ketangguhan masyarakat terhadap bencana tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus melalui proses yang berkelanjutan, melibatkan semua pihak, dan mengedepankan nilai-nilai gotong royong serta kepemimpinan lokal yang responsif.

Dengan demikian, jika dilihat melalui lensa teori implementasi kebijakan Edward III, seluruh elemen pelaksanaan GKSTTB di Wonorejo telah menunjukkan sinergi yang harmonis antar variabel. Kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana yang baik, dan struktur birokrasi yang fungsional menjadi kombinasi yang menentukan keberhasilan kebijakan ini. Wonorejo tidak hanya menunjukkan ketangguhan teknis dalam mitigasi bencana, tetapi juga ketangguhan sosial yang dibangun atas dasar kolaborasi, kepedulian, dan pemberdayaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor:179/Skr/PKK.Pusat/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor:100.3.3.3/326/436.1.2/2023 pada tanggal 27 November 2023 Tentang Penetapan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Sebagai Pilot Project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tahun 2023, dan diperkuat juga dengan adanya Surat Keputusan Ketua TP. PKK Kota Surabaya nomor : 06/KEP/PKK.KOTA/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 tentang Penetapan Daerah Pilot Project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Siaga Kebakaran Lingkungan. Analisis menggunakan teori George C. Edward III menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi berjalan efektif dengan penyampaian informasi melalui berbagai media cetak, online, sosial media, serta pelatihan dan sosialisasi secara langsung.
2. Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan telah dikelola dengan baik

meskipun terdapat keterbatasan dana, terutama untuk pengadaan alat pemadam api ringan (APAR), sehingga warga turut berinisiatif membeli peralatan secara mandiri.

3. Disposisi pelaksana kebijakan diperkuat melalui pengangkatan birokrasi yang tepat dan pemberian insentif guna menjaga motivasi dan komitmen.
4. Struktur birokrasi yang diterapkan bersifat dinamis dan inklusif, melibatkan berbagai elemen masyarakat aktif sehingga mempermudah koordinasi, mengurangi hambatan birokrasi, mempercepat respons kebakaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program.

Secara keseluruhan, penerapan keempat indikator tersebut berjalan sinergis dan menjadi kunci keberhasilan GKSTTB di Kelurahan Wonorejo sebagai model mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan masih adanya kendala pada pelaksanaan GKSTTB Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, terdapat saran yang dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut :

1. Penguatan Komunikasi : Terus tingkatkan kualitas komunikasi melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi agar pesan kebijakan tersampaikan dengan jelas dan konsisten kepada seluruh warga dan pelaksana.
2. Optimalisasi Sumber Daya : Perluasan pelibatan kader dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan anggaran dan peralatan secara transparan dan tepat sasaran untuk menjaga keberlanjutan program.
3. Pengembangan Disposisi Pelaksana: Berikan insentif yang memadai dan lakukan seleksi ketat dalam pengangkatan pelaksana agar motivasi dan komitmen tetap tinggi, serta dorong budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.
4. Penyempurnaan Struktur Birokrasi : Perkuat SOP dan struktur organisasi dengan memperjelas pembagian tugas dan wewenang, serta tingkatkan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan kebijakan lebih responsif dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anazkia. (2025). *Blog Berbagi Ilmu dan Informasi: Menelusuri Makna Keluarga*. Retrieved from <https://anazkia.id/menelusuri-makna-keluarga-memahami-pengertian-dan-jenis-jenisnya>
- Antara Jatim. (2022). *Sebanyak 154 Kader MADAGASKAR Surabaya Dikukuhkan*. Retrieved from <https://jatim.antaranews.com/berita/580449/sebanyak-154-kader-madagaskar-surabaya-dikukuhkan>
- Arai, Y., & Oktoriana, S. (2017). Enhancing Local Community's Sense of Ownership through International Cooperation. *Wetl. Res.*, 7, 5–16.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2020). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh - Edisi Kelima*. Retrieved from <https://www.bnpb.go.id/buku/buku-saku-tanggap-tangkas-tangguh-cetakan-kelima-2020>
- Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh (Damkar Banda Aceh). (2020). *Pengertian Definisi Api dan Kebakaran*. Retrieved from <https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/pengertian-definisi-api-dan-kebakaran/>
- Emilda, A. S., Magfirah, M., Asmanidar, A., Syahputra, A., & Dewi, S. (2022). Pelatihan Mitigasi Pra Bencana pada Organisasi PKK di Kecamatan Langsa Lama. *J. Kreat. Pengabd. Kpd. Masy.*, 5(12), 4484–4495. Retrieved from <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/8283/0>
- Husnawati, H., & Yusran, R. (2024). Inovasi Kebijakan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Dan Tangguh Bencana Dalam Penurunan Stunting. *J. Adm. Pemerintah. Desa*, 5(2), 9. Retrieved from <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index>
- Kusumawardani, R. P. N., & Oktariyanda, T. A. (2024). Efektivitas Program Roti 7 Lapis di Dinas Pemadam Surabaya. *Publika*, 222–236. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58714>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Pemerintahan Kota Surabaya. (n.d.). *Profil Sejarah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya*. Retrieved from https://pemerintahan.surabaya.go.id/kelurahan_wonorejo_rungkut/profil-sejarah
- PKK Jakarta. (n.d.). *Sejarah Singkat PKK*. Retrieved from <https://pkk.jakarta.go.id/sejarah-singkat-pkk>
- Pratiwi, D. I. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh Bencana di Pilangsari. *Publika*, 7(7). Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/29557/27080>
- Prayogo, A. N., & Fanida, E. H. (2024). Kajian Dampak Layanan Pemadaman Gratis Program Roti 7 Lapis. *Publika*, 945–956. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/64119>
- Sasmito, N. B., & Ns, P. (2023). Faktor Hubungan Kesiapsiagaan Keluarga dalam Menghadapi Dampak Bencana. *J. Educ. Res.*, 4(1), 81–91. Retrieved from <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/129/104>
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono, D. (2022). *Peresmian Kader MADAGASKAR. Antara Foto*. Retrieved from <https://www.antarafoto.com/id/view/1612437/peresmian-kader-madagaskar>
- Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh. (2021). *Buku Petunjuk Teknis Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana 2021–2024*. Retrieved from https://tppkk.acehprov.go.id/media/2023.01/juknis_gerakan_keluarga_sehat_tanggap_dan_tangguh_bencana1
- Tim Penggerak PKK Kota Surabaya. (2023). *Foto Observasi Lapangan GKSTTB TP. PKK Pusat*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Wantouw, F., Raco, B., & Padachan, C. (2023). Analisis Resiko Penanggulangan Kebakaran Gedung Yosephus Unika De La Salle Manado. *J. Ilm. Realt.*, 19(2), 42–48. Retrieved from <https://ejournal.unikadelasalle.ac.id/index.php/realtech/article/view/87/83>
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.
- Yurita, R. T. (2021). *Strategi Program Desa Tangguh Bencana oleh BPBD di Desa Sukaraksa*. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56279/1/RISMA%20TRI%20YURITA-FDK.pdf>